



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERIKANAN

Alamat : Komplek Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Wewangri Kec. Malili,

Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Website : <https://www.luwutimurkab.go.id/> Email : diskan@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025, perlu disusun rencana kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran tahun 2025.
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

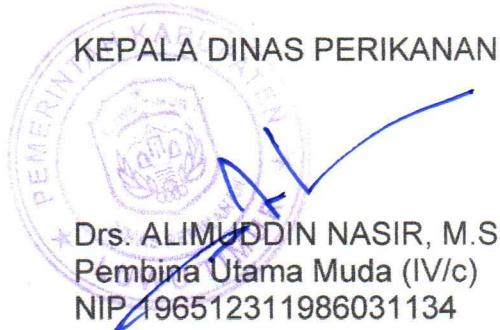
- undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Perikanan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Juli 2025



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 30 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juli 2025

**SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2025 DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Juli 2025



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196512311986031134

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga "Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 dapat diselesaikannya sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun ke 4 dari Rancangan RPJMD 2021-2026. Renja ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2023 dan memberi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya terutama pada sektor Perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan perikanan di daerah.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana kerja ini dapat terselesaikan disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juli 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	12
BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	16
BAB IV PENUTUP	17
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muatan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, wajib dijabarkan oleh setiap OPD dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya.

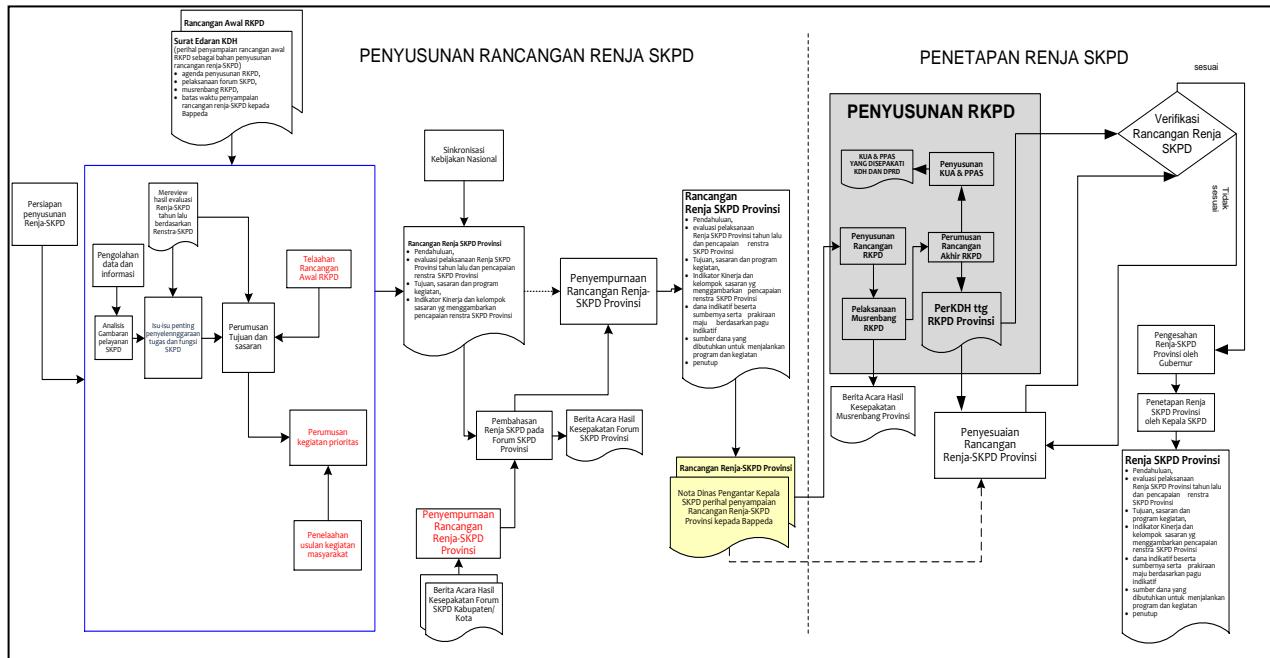
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja harus mengacuh pada Renstra OPD dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dan berkesinambungan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke Empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Prioritas pembangunan Dinas Perikanan difokuskan pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD tahun 2025. Penyusunan Renja OPD harus

mempertimbangan RKP Nasional, RKPD Propinsi dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur TA. 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023-2044;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
29. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 307/D-06/VII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur; dan
30. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah :

- ☞ Untuk menjabarkan program dan kegiatan RENSTRA OPD ke dalam program/kegiatan Tahunan
- ☞ Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD-P, KUA PPAS-P RKA P Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025
- ☞ Menyiapkan Kerangka valuasi Kinerja Program/Kegiatan dalam 1 Tahun
- ☞ Membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 antara lain :

- ☞ Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- ☞ Terbangunnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan;
- ☞ Menyediakan satu tolok ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan.
- ☞ Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
- ☞ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Perikanan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Dokumen Renja Perubahan Dinas Perikanan Luwu Timur TA. 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021-2026. Secara umum evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025, dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja OPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Tahun Anggaran 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2025 dapat dilihat melalui **Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan** yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021-2026 disajikan pada pada **Tabel 1. (Terlampir)**.

Berdasarkan tabel evaluasi Renja Dinas Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 9 (*Sembilan*) kegiatan dan 25 (*Dua Puluh Lima*) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar 37,56 % Predikat Kinerja Rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.2.058.804.957,-

atau 41,81 % dari pagu anggaran sebesar Rp.4.924.167.900,-. Realisasi Keuangan pada program ini masih rendah karena adanya beberapa sub kegiatan belum pencapaian target kinerja seperti pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini terdiri atas 3 (*Tiga*) Kegiatan dan 6 (*Enam*) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar 44,65 % Predikat Kinerja rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.364.409.169,32- atau 19,52 % dari pagu anggaran sebesar Rp.1.866.984.450,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan ini yang menjadi target kinerja tidak terealisasi kerena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini terdiri atas 2 (*Dua*) kegiatan dan 7 (*Tujuh*) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar 70 % Predikat Kinerja Tinggi sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 31.309.466,- atau 14,39 %, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.163.490.008,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan ini yang menjadi target kinerja tidak terealisasi kerena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini terdiri atas 1 (*Satu*) kegiatan dan 1 (*Satu*) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar 100 % Predikat Kinerja sangat Tinggi sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.7.224.960,- atau 13,87 % dari pagu

angaran sebesar Rp.52.096.500,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena kegiatan yang menjadi target kinerja tidak terealisasi yang disebabkan belum optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan karena terkendala cuaca dan kesiapan petugas patroli.

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini terdiri atas 3 (*Tiga*) Kegiatan dan 3 (*Tiga*) Sub Kegiatan yaitu. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar 33,12 % Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.51.301.340,- atau 4,94 % dari pagu angaran sebesar Rp.1.038.797.300,- Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan yang menjadi target kinerja tidak terealisasi kerena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Urusan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk peningkatan usaha perikanan dan menumbuhkan sikap kemandirian petani ikan dalam upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agroindustri yang berbasis Sumber daya lokal dan pasar global.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur

No.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISIS
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11						
2	Produksi Perikanan (%)	100	100	100	100	100	101,06					
3	Konsumsi Ikan (%)	100	100	100	100	100	100					
4.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	26,66					
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	3,11					
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,28					
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,001					
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	106,01	106,87	107,73	108,59	109,45	103,93					

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik (*public service*) dan tanggung jawab (akuntabilitas), dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah – langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Beberapa isu strategis yang melingkupi pelaksanaan pelayanan di sektor Perikanan antara tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI

Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI				
	Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi	Kelembagaan
1	Penurunan stok ikan	Kesenjangan gender/akses perempuan masih rendah untuk ikut berpartisipasi	Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan	
2	Pemanfaatan tata ruang laut dan pesisir (sinergitas perencanaan yang lemah)	a. Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah b. Teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi masih kurang	a. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut) b. Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang	
3	Masih maraknya IUU fishing di wilayah pesisir dan perairan umum	Pemahaman masyarakat tentang penanganan mutu masih rendah	Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal	
4	Hama dan penyakit udang/ikan/rumput laut	Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah	Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas	
5	Degradasi dan kerusakan lingkungan	Pemahaman ekosistem berkelanjutan masih sangat rendah	Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan adalah Sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya.
- b. Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang menunjang kebijakan pengelolaan kegiatan perikanan.
- d. Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- e. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
- f. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian
- g. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- h. Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara internal/bersifat ke dalam, adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

- c. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja
- d. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang undangan
- e. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik manajerial, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran
- f. Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi
- g. Masih ditemukannya budaya kerja pegawai/Pegawai ASN yang bekerja menunggu perintah atasan dan tidak memahami tugas pokok dan fungsi

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar Pegawai ASN berdisiplin dan profesional.
- b. Adanya komitmen untuk menegakkan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan good governance.
- c. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah.
- d. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan.
- e. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional dan berwawasan global.
- f. Tersedianya jaringan internet online di semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

4. Tantangan (*Threat*)

- a. Perubahan dan perkembangan teknologi dan permasalahan di masyarakat yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat

- c. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat perikanan Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- d. Kurangnya tingkat partisipasi stakeholder di dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- e. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025 Dinas Perikanan direncanakan melaksanakan 5 Program, 18 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.10.045.536.158,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada lampiran **tabel. 4** :

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka pada Tahun Anggaran 2025, Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan sebanyak 5 Program yang akan diakselerasikan dengan visi misi Bupati terpilih serta RPJP Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaanya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat

kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Malili, Juli 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 196512311986031134

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

FORMAT 6

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket			
					I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = (12/7*100)	14 = (6+12)	15 = (14/5*100)	16	17					
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE RATA-RATA KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (PERSEN)	100	4,924,167,900.00	18.04	987,918,646.00	19.51	1,070,886,311.00					37.56	2,058,804,957.00	37.56%	41.81%	127.90	6,773,415,098.00	127.90%	26.02%		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Topat Waktu (Persen)	100	93,294,550.00	35.29	11,700,000.00	17.65	11,909,340.00					52.94	23,609,340.00	52.94%	25.31%	152.94	144,735,881.00	152.94%	34.75%		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	38,000,800.00	1	7,500,000.00	1	7,579,670.00					2	15,079,670.00	66.67%	39.68%	4.00	53,132,270.00	40.00%	32.20%	Diskan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	4,373,000.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0%	0%	2.00	4,288,750.00	40.00%	19.49%	Diskan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	5,158,500.00	1	0.00	0	1,109,890.00					1	1,109,890.00	50%	21.52%	3.00	6,643,890.00	60.00%	34.07%	Diskan	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	45,762,250.00	4	4,200,000.00	2	3,219,780.00					6	7,419,780.00	60%	16.21%	16.00	80,670,971.00	32.00%	38.41%	Diskan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara Dengan Baik (Persen)	100	3,993,212,100.00	23.37	825,585,460.00	25.54	912,496,997.00					48.91	1,738,082,457.00	48.91%	43.53%	143.17	5,082,706,697.00	143.17%	24.86%		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	26	3,928,557,100.00	27	817,905,460.00	27	902,476,997.00					14	1,720,382,457.00	48.21%	43.79%	39.50	4,978,004,062.00	127.42%	24.81%	Diskan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	64,655,000.00	4	7,680,000.00	5	10,020,000.00					9	17,700,000.00	50%	27.38%	27.00	104,702,635.00	30.00%	27.50%	Diskan	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai Standar (Persen)	100	44,052,000.00	25	8,136,800.00	25	8,579,200.00					50	16,716,000.00	50%	37.95%	150.00	68,970,050.00	150.00%	62.70%		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	44,052,000.00	1	8,136,800.00	1	8,579,200.00					2	16,716,000.00	50%	37.95%	6.00	68,970,050.00	30.00%	62.70%	Diskan	
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Persen)	100	11,216,500.00	1.90	1,000,000.00	1.90	1,939,560.00					1.90	2,939,560.00	1.90%	26.21%	14.58	17,551,560.00	14.58%	50.15%		
		Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	11,216,500.00	1	1,000,000.00	1	1,939,560.00					2	2,939,560.00	50%	26.21%	6.00	17,551,560.00	30.00%	50.15%	Diskan	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah (Persen)	100	83,209,850.00	12	3,000,000.00	20	11,174,780.00					32	14,174,780.00	32%	17.03%	174.12	113,566,350.00	174.12%	40.56%		
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaihan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaihan (Dokumen)	12	20,829,850.00	3	3,000,000.00	3	2,219,780.00					6	5,219,780.00	50%	25.06%	18.00	30,704,080.00	30.00%	23.62%	Diskan	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	13	62,380,000.00	0	0.00	2	8,955,000.00					2	8,955,000.00	15.38%	14.36%	10.00	82,862,270.00	28.57%	55.24%	Diskan	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Capaikan Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket		
						I		II		III		IV													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13 = (12/7*100)	14 = (6+12)	15 = (14/5*100)	16	17											
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	202,867,400.00	20.14	65,570,041.00	25.69	38,084,300.00					45.83	103,654,341.00	45.83%	51.09%	145.83	829,084,408.00	145.83%	34.42%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	6,864,000.00	10	1,710,000.00	10	1,617,000.00					5	3,327,000.00	50%	48.47%	17.00	10,145,000.00	141.67%	28.99%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	36,000,000.00	0	0.00	2	0.00					2	0.00	100%	0%	8.00	121,050,000.00	40.00%	807.00%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	10,641,000.00	17	2,106,000.00	17	2,341,000.00					9	4,447,000.00	42.50%	41.79%	28.50	15,077,000.00	19.00%	75.39%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	7,930,000.00	0	0.00	1	540,000.00					1	540,000.00	25%	6.81%	5.00	9,470,000.00	25.00%	23.68%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	7,500,000.00	9	925,000.00	12	1,275,000.00					21	2,200,000.00	43.75%	29.33%	69.00	8,100,000.00	28.75%	26.56%	Diskan			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12,830,000.00	3	3,300,000.00	3	0.00					6	3,300,000.00	50%	25.72%	18.00	16,307,000.00	2.25%	90.59%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	121,102,400.00	3	57,529,041.00	3	32,311,300.00					6	89,840,341.00	50%	74.19%	18.00	648,935,408.00	1.80%	28.84%	Diskan			
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi (Persen)	100	65,160,000.00	0	0.00	0	0.00					0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%				
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	65,160,000.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Diskan			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (Persen)	100	282,202,500.00	25	58,592,938.00	25	54,137,312.00					50	112,730,250.00	50%	39.95%	281.63	352,470,223.00	281.63%	22.43%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	7,282,500.00	3	1,310,000.00	3	219,780.00					6	1,529,780.00	50%	21.01%	18.00	4,984,780.00	0.18%	28.48%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	84,600,000.00	3	18,282,938.00	3	20,837,532.00					6	39,120,470.00	50%	46.24%	18.00	114,305,443.00	180.00%	14.83%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	190,320,000.00	3	39,000,000.00	3	33,080,000.00					6	72,080,000.00	50%	37.87%	18.00	233,180,000.00	225.00%	29.78%	Diskan			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik (Persen)	100	148,953,000.00	19.70	14,333,407.00	34.85	32,564,822.00					54.55	46,898,229.00	54.55%	31.49%	154.55	164,329,929.00	154.55%	29.03%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnannya (Unit)	23	97,050,000.00	3	9,143,407.00	12	14,093,822.00					15	23,237,229.00	65.22%	23.94%	38.00	89,856,929.00	165.22%	24.22%	Diskan			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara (Unit)	40	23,300,000.00	10	5,190,000.00	10	4,560,000.00					20	9,750,000.00	50%	41.85%	60.00	33,070,000.00	240.00%	47.28%	Diskan			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	28,603,000.00	0	0.00	1	13,911,000.00					1	13,911,000.00	33.33%	48.63%	4.00	41,403,000.00	133.33%	33.12%	Diskan			
				4,924,167,900.00								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								48.16%	41.81%				
												Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah				
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	11,410	1,866,984,450.00	2,517.24	343,527,859.32	2,575.27	20,881,210.00					5,092.51	364,409,169.32	44.63%	19.52%	15,573.95	9,413,479,936.01	150.20%	86.80%					
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap (Persen)	100	1,193,171,260.00	0	328,994,959.32	0	4,724,450.00					0.00	333,719,409.32	0%	27.97%	100.00	9,169,343,351.32	100.00%	100.60%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Capaikan Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket		
						I		II		III		IV													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = (12/7*100)		14 = (6+12)		15 = (14/5*100)		16	17		
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	4	29,722,300.00	1	8,130,000.00	1	4,724,450.00						2	12,854,450.00	50%	43.25%	6.00	75,783,580.00	120.00%	66.25%	Diskan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Diberdayakan (Unit)	3	898,448,960.00	0	320,864,959.32	0	0.00						0	320,864,959.32	0%	35.71%	1.00	518,438,336.32	10.00%	25.92%	Diskan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	2	265,000,000.00	0	0.00	0	0.00						0	0.00	0%	0%	60.00	8,575,121,435.00	80.00%	122.50%	Diskan		
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan Kelompok Nelayan yang Diberdayakan (Person)	100	97,349,300.00	5.88	14,533,000.00	5.88	16,156,760.00						11.76	30,689,760.00	11.76%	31.53%	111.75	184,746,060.00	111.75%	25.30%			
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	40	28,801,300.00	0	0.00	0	219,780.00						0	219,780.00	0%	0.76%	40.00	42,070,680.00	40.00%	11.06%	Diskan		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelempok)	11	68,548,000.00	3	14,533,000.00	3	15,936,980.00						6	30,469,980.00	54.55%	44.45%	31.00	142,675,380.00	51.67%	40.81%	Diskan		
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang Dioperasikan sesuai dengan Standar (Person)	86	576,463,890.00	0	0.00	0	0.00						0	0.00	0%	0%	75.00	59,390,524.69	75.00%	5.94%			
		Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3	576,463,890.00	0	0.00	0	0.00						0	0.00	0%	0%	1.00	59,390,524.69	20.00%	5.94%	Diskan		
					1,866,984,450.00																				
III		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	416,897	2,163,490,008.00	139,816.02	171,594,986.56	153,625.48	139,714,480.00						293,441.50	311,309,466.56	70.39%	14.39%	672,438.20	8,355,850,702.24	212.55%	37.57%			
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan, Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan Kemirutan Usaha, Kemudahan Akses Iptek dan Informasi dan Pengukuhan Kelembagaan (Person)	100	203,043,200.00	0	21,092,955.00	46.67	84,275,940.00						46.67	105,368,895.00	46.67%	51.89%	146.66	477,754,015.00	146.66%	39.81%			
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelempok)	10	48,298,200.00	0	0.00	0	2,431,400.00						0	2,431,400.00	0%	5.03%	27.00	24,218,525.00	18.00%	3.46%	Diskan		
		Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelempok)	Jumlah Kelompok Usaha yang Mendapatkan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelempok)	20	154,745,000.00	0	21,092,955.00	14	81,844,540.00						14	102,937,495.00	70%	66.52%	41.00	453,535,490.00	27.33%	90.71%	Diskan		
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Sarana dan Prasarana yang Disediakan Kepada Pembudidaya Ikan (Person)	100	1,960,446,808.00	0	150,502,031.56	0	55,438,540.00						0.00	205,940,571.56	0%	10.50%	84.07	7,878,096,687.24	84.07%	37.44%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	4	32,808,900.00	1	8,861,500.00	1	8,666,890.00						2	17,528,390.00	50%	53.43%	6.00	80,735,390.00	30.00%	8.07%	Diskan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	7	1,472,055,408.00	0	92,106,750.56	0	0.00						0	92,106,750.56	0%	6.26%	8.43	1,355,240,017.84	16.86%	15.58%	Diskan		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Capaikan Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung gjawab	Ket		
						I		II		III		IV													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12		13 = (12/5*100)		14 = (6+12)		15 = (14/5*100)		16	17	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	4	98,296,000.00	1	14,810,181.00	1	27,795,290.00						2	42,605,471.00	50%	43.34%	97.00	6,041,526,099.40	97.00%	60.42%	Diskan		
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	130,000,000.00	0	0.00	0	0.00						0	0.00	0%	0%	30.00	73,358,620.00	20.00%	18.34%	Diskan		
		Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	1	227,286,500.00	0	34,723,600.00	0	18,976,360.00						0	53,699,960.00	0%	23.63%	75,640.00	327,236,560.00	15.44%	34.81%	Diskan		
					2,163,490,008.00																				
IV		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (PERSEN)	96	52,096,500.00	96	4,508,400.00	96	2,716,560.00						96.00	7,224,960.00	100%	13.87%	191.00	85,468,760.00	198.96%	34.19%			
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pengawas yang Aktif (Persen)	100	52,096,500.00	100	4,508,400.00	100	2,716,560.00						100	7,224,960.00	100%	13.87%	200.00	85,468,760.00	200.00%	34.19%			
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)	4,000	52,096,500.00	1,000	4,508,400.00	1,000	2,716,560.00						2,000	7,224,960.00	50%	13.87%	2,024.00	85,468,760.00	1686.67%	34.19%	Diskan		
					52,096,500.00																				
V		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI HASIL PENGOLAHAN IKAN (TON)	618	1,038,797,300.00	109.35	30,127,800.00	95.32	21,173,540.00						204.67	51,301,340.00	33.12%	4.94%	769.13	808,496,893.00	207.87%	12.29%			
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Kelompok Usaha yang Melakukan Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan (RTP) (Persen)	100	155,710,200.00	100	12,510,600.00	100.00	12,841,820.00						100	25,352,420.00	100%	16.28%	200.00	264,812,751.00	200.00%	14.23%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	4	155,710,200.00	1	12,510,600.00	1	12,841,820.00						2	25,352,420.00	50%	16.28%	6.00	264,812,751.00	30.00%	14.23%	Diskan		
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Percentase Kelompok Usaha Perikanan yang Meningkat Kelasnya (Persen)	83	161,713,100.00	0	6,000,000.00	0.00	7,087,520.00						0.00	13,087,520.00	0%	8.09%	85.00	145,958,010.00	102.41%	19.05%			
		Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	10	161,713,100.00	0	6,000,000.00	2	7,087,520.00						2	13,087,520.00	20%	8.09%	8.00	145,958,010.00	32.00%	19.05%	Diskan		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Penilaian Berikutnya :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



2537541271

#####

Di Evaluasi Oleh:
KEPALA BAPEI ITBANGDA

Drs. DOHRI AS'ARI
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 19670912 198811 1 003

RANCANAGAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	5	6	7			
5	BELANJA				14,131,707,900	9,961,960,958	(4,169,746,942)	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	100	5,349,547,300	4,859,007,900	(490,539,400)	
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	121,248,250	93,294,550	(27,953,700)	
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	3	3	38,668,500	38,000,800	(667,700)	Efisiensi
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	4,728,000	4,373,000	(355,000)	Efisiensi
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	5,918,000	5,158,500	(759,500)	Efisiensi
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	71,933,750	45,762,250	(26,171,500)	Efisiensi
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (Persen)	100	100	4,013,795,600	3,993,212,100	(20,583,500)	
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	28	28	3,928,557,100	3,928,557,100	-	
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	18	85,238,500	64,655,000	(20,583,500)	Efisiensi
3.25.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar (Persen)	100	100	53,213,200	44,052,000	(9,161,200)	
3.25.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	53,213,200	44,052,000	(9,161,200)	Efisiensi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3.25.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (Persen)	100	100	15,150,500	11,216,500	(3,934,000)	
3.25.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	15,150,500	11,216,500	(3,934,000)	Efisiensi
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100	100	114,348,850	83,209,850	(31,139,000)	
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	12	28,490,850	20,829,850	(7,661,000)	Efisiensi
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	13	13	85,858,000	62,380,000	(23,478,000)	Efisiensi
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Persen)	100	100	328,090,400	202,867,400	(125,223,000)	
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	6,864,000	6,864,000	-	
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	36,000,000	36,000,000	-	
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	10,641,000	10,641,000	-	
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	4	10,070,000	7,930,000	(2,140,000)	Efisiensi
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	48	7,500,000	7,500,000	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	14,500,000	12,830,000	(1,670,000)	Efisiensi
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	242,515,400	121,102,400	(121,413,000)	Efisiensi
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (Persen)	100	100	270,000,000	-	(270,000,000)	
3.25.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2	2	65,160,000	65,160,000		
3.25.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		270,000,000		(270,000,000)	Efisiensi
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (Persen)	100	100	284,747,500	282,202,500	(2,545,000)	
3.25.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	9,827,500	7,282,500	(2,545,000)	Efisiensi
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	84,600,000	84,600,000	-	
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	190,320,000	190,320,000	-	
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (Persen)	100	100	148,953,000	148,953,000	-	
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	23	23	97,050,000	97,050,000	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	40	40	23,300,000	23,300,000	-	
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3	3	28,603,000	28,603,000	-	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	10,216.00	10,216.00	3,358,958,600	1,866,984,450	(1,491,974,150)	
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	100	2,669,288,300	1,193,171,260	(1,476,117,040)	
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen)	4	4	51,904,300	29,722,300	(22,182,000)	Efisiensi
3.25.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/Rehap (Unit) KP 1	3	3	577,584,000	898,448,960	320,864,960	
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Usaha Perikanan ikan yang diberikan Ke Masyarakat (Kelompok) KP 1	14	2	2,039,800,000	265,000,000	(1,774,800,000)	Efisiensi
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	100	114,870,300	97,349,300	(17,521,000)	
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan purse saine yang dilatih (orang)	40	40	33,220,300	28,801,300	(4,419,000)	Efisiensi
3.25.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok)	11	11	81,650,000	68,548,000	(13,102,000)	Efisiensi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	71	71	574,800,000	576,463,890	1,663,890	
3.25.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyeleggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	3	574,800,000	576,463,890	1,663,890	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	315,710	315,710	3,215,057,200	2,163,490,008	(1,051,567,192)	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Percentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (Persen)	100	100	227,594,200	203,043,200	(24,551,000)	
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	10	10	51,358,200	48,298,200	(3,060,000)	Efisiensi
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD (kelompok)	20	20	176,236,000	154,745,000	(21,491,000)	Efisiensi
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100	100	2,987,463,000	1,960,446,808	(1,027,016,192)	
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	64,943,000	32,808,900	(32,134,100)	Efisiensi
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	12	7	1,994,604,000	1,472,055,408	(522,548,592)	Efisiensi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersedian Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	9	4	558,400,000	98,296,000	(460,104,000)	Efisiensi
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	4	1	125,934,000	130,000,000	4,066,000	
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	1	1	243,582,000	227,286,500	(16,295,500)	Efisiensi
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)	94	94	66,618,500	52,096,500	(14,522,000)	
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	100	66,618,500	52,096,500	(14,522,000)	
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tagkap Di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	4,000	4,000	66,618,500	52,096,500	(14,522,000)	Efisiensi
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan ikan (ton)	335	335	2,141,526,300	1,020,382,100		
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	100	233,386,200	137,295,000	(96,091,200)	
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	4	4	233,386,200	137,295,000	(96,091,200)	Efisiensi
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	83	190,630,100	161,713,100	(28,917,000)	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	10	10	190,630,100	161,713,100	(28,917,000)	Efisiensi
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	64	64	1,717,510,000	721,374,000	(996,136,000)	
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	13	-	1,717,510,000	721,374,000	(996,136,000)	Efisiensi